



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H HAERUL NURDIN
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 493252

II. DATA HARTA

| | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 2.150.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/207 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000 | | |
| 2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/90 m2 di KAB / KOTA BULUKUMBA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 126.500.000 |
| 1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000 | | |
| 2. MOTOR, SUZUKI FL 125 RCD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 140.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 35.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 2.451.500.000 |

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **2.451.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.